

ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KALIMANTAN UTARA

Jihni Rantika^{a*}, Arfida Boedirochminarni^b

^{a,b}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

* Corresponding author: jihni.rant20@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 21/02/2023

Revised 11/04/2023

Accepted 17/04/2023

Available online 26/06/2023

Keyword: Local Tax; Regional Original Income (PAD); Regional Retributions

JEL Classification:

H23; H25; H27

Abstract

This study aims to describe the general picture of local tax revenues, regional retributions, and the results of separated regional wealth management (HPKDYD) and analyze the influence of each factor that effects regional original income (PAD), namely regional taxes, regional retributions, and management results regional wealth which is separated from the original regional income of the Regency and City of North Kalimantan Province in 2013-2020. The objects of this research are 4 districts (Malinau regency, Nunukan regency, Bulungan regency, Tana Tidung regency) and 1 city (Tarakan city). The method used is panel data regression analysis and classical assumption included multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, chow test, hausman test, T-test, F-test, and coefficient of determination. The results of this study indicate that the local tax variable and HPKDYD have a positive but not significant effect on local revenue. Meanwhile, the results of the regional retributions variable show that there is no positive and insignificant effect on local revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran umum penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD) serta menganalisis pengaruh masing-masing faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2020. Obyek penelitian ini adalah 4 kabupaten (Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung) dan 1 kota (Kota Tarakan). Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji chow, uji hausman, uji T, uji F, dan koefisien determinasi.

Copyright (c) 2023
Rantika, J. &
Boedirochminarni, A.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan HPKDYD berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil variabel retribusi daerah menunjukkan tidak ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu daerah terintegrasi menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berdasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagai pengelola sumber daya. Otonomi daerah merupakan bentuk hak dan kewajiban pemerintah daerah (pemda) dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri sinkron dengan kemampuan daerahnya. Pada pelaksanaan otonomi daerah, pemda harus mengidentifikasi sektor yang berpotensi sebagai penggerak pembangunan daerah, terutama melalui pengembangan potensial Pendapatan Asli Daerah/PAD. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 1 nomor 18 membahas bahwasanya PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Pendapat (Elim, 2016), menyatakan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari beberapa sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perda. Beberapa sumber penerimaan PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pernyataan dari (Mardiasmo (2002:132) dalam (mulyana utami, 2018) menyatakan PAD ialah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan daerah itu sendiri (Buschman & Sjoquist, 2011 dalam (Akbar et al., 2019)). Menurut (Thamus, 2020), pajak sebagai pendukung utama sumber keuangan penggerak roda pemerintah. Sementara retribusi daerah, salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai bentuk imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemda kepada masyarakat (Nasir, 2019). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dinyatakan sebagai hasil penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan (Hafandi & Romandhon, 2020). Menurut (Anggraini et al., 2017), jenis pendapatannya mencakup laba atas penyertaan modal BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

Sebagaimana penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan pada penelitian ini, untuk itu terdapat penelitian sejenis yang dilakukan oleh (Perpajakan et al., 2017) yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Penelitian serupa

dilakukan (Suharyadi et al., 2018) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kedua variabel retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan (Albab et al., 2020) yang mengemukakan pajak daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD kabupaten Bengkulu, sementara retribusi daerah tidak adanya pengaruh terhadap PAD kabupaten Bengkulu. Dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan publik kurang memadai, sehingga penerimaan retribusi daerahnya kecil.

Adapun penelitian lainnya seperti yang dilakukan (Hafandi & Romandhon, 2020), hasilnya menyatakan Berikut besarnya rata-rata kontribusi dari beberapa sumber pertumbuhan PAD variabel pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sementara, variabel retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian sejenis dilakukan (Ilmu, 2017) yang menyebutkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, namun retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. (Kresnandra & Erawati, 2013) menyatakan hasil pengujian parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian serupa dilakukan (Hadiyatno et al., 2020). Berikut besarnya rata-rata kontribusi dari beberapa sumber penerimaan PAD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara selama delapan tahun terakhir yang ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1. Rata-rata Kontribusi Sumber Penerimaan PAD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Thun 2013 – 2020 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	HPKDYD	LPADYS
2013	52.3	20.1	53.7	286.7
2014	62.8	18.0	63.5	330.9
2015	76.3	19.4	44.2	268.9
2016	72.9	23.8	37.9	175.0
2017	103.1	24.8	49.1	167.1
2018	108.9	29.9	44.6	160.3
2019	133.9	23.9	41.7	201.9
2020	121.6	26.0	23.9	283.0

Tabel 1. menunjukkan besarnya rata-rata kontribusi komponen pendorong PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah (LPADYS) yang ada di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel data di atas, diketahui bahwasanya dari keempat faktor pendorong atau sumber penerimaan PAD yang berkontribusi paling besar adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LPADYS). Sebagai provinsi paling muda di Indonesia dan hanya terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota saja, membuat provinsi Kalimantan Utara

dinilai masih memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga berbeda dengan beberapa daerah yang lain dimana pajak daerah dan retribusi daerah berperan dominan sebagai sumber PAD. Berbeda dengan Kalimantan Utara yang cenderung sumber Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang berperan dominan terhadap PAD.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hanya menggunakan tiga variabel faktor pendorong PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD)) sebagai variabel untuk membuktikan apakah ketiganya berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2013-2020, kedua, menguji regresi data panel, serta menganalisis pengaruh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2013-2020.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah provinsi Kalimantan Utara dan sampelnya terdiri atas 4 Kabupaten (Malinau, Nunukan, Bulungan, Tana Tidung) dan 1 Kota (Tarakan). Untuk pengumpulan data melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dengan melihat dokumen laporan realisasi APBD tahun 2013 – 2020. Adapun teknik analisis data yang digunakan teknik analisis regresi berganda data panel yang melalui program software *Microsoft Excel 2016* dan *E-Views 9*. Yang mana akan dipilih pendekatan yang terbaik dari *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* dengan menggunakan uji regresi data panel dan uji asumsi klasik diantaranya *Uji Chow*, *Uji Hausman*, *Uji Multikolinearitas*, *Uji Heteroskedastisitas*, *Uji Autokorelasi*, *Uji Normalitas*, *Uji-T*, *Uji-F*, dan *Koefisien Determinasi*. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Model persamaan sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + \beta_3 HPKDYD_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- PAD_{it} : Jumlah Pendapatan Asli Daerah tiap Kabupaten dan Kota (Jutaan Rupiah)
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
- PD_{it} : Jumlah Pajak Daerah Kabupaten dan Kota i pada tahun t
- RD_{it} : Jumlah Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota i pada tahun t
- $HPKDYD_{it}$: Jumlah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten dan Kota i pada tahun t

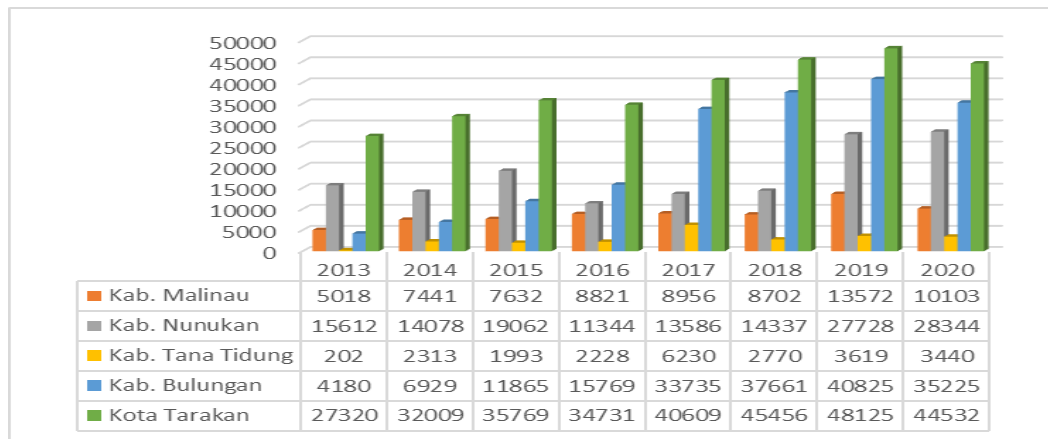
ε : error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Gambaran Umum Pajak Daerah, Retribusi Daerah, HPKDYD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2020

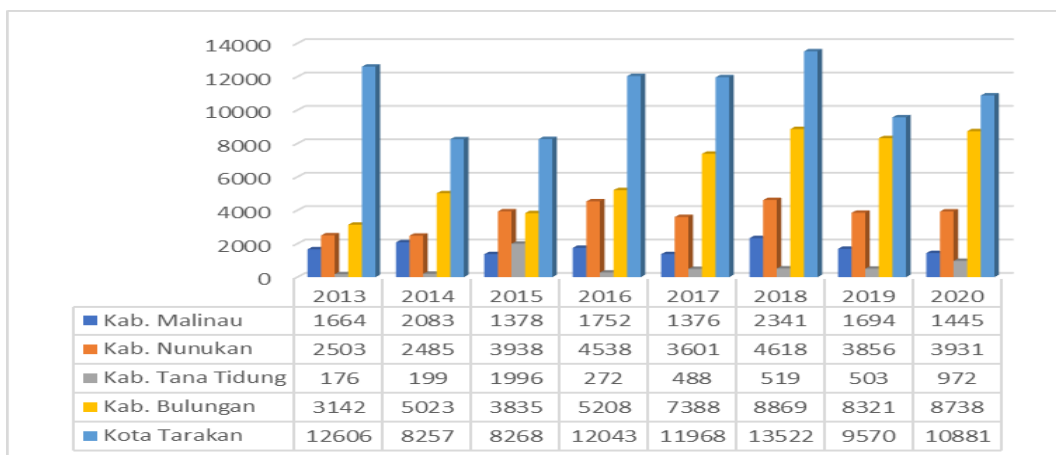
Berdasarkan gambar grafik 1, 2 dan 3, wilayah yang berkontribusi dominan pada penerimaan pajak daerah dan HPKDYD di provinsi Kalimantan Utara adalah kota Tarakan yang artinya kota Tarakan memiliki persediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan daerah lainnya. Untuk wilayah yang memegang peranan dominan pada penerimaan HPKDYD yaitu kabupaten Bulungan yang mana membuktikan daerah tersebut memiliki kinerja pasar yang lebih baik.

Gambar 1. Jumlah Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2020



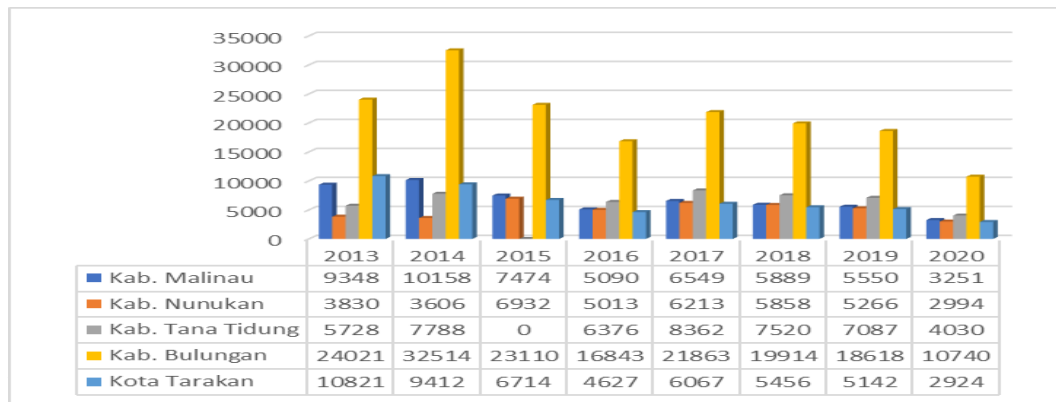
Sumber: (DJPK Kementerian Keuangan, 2018)

Gambar 2. Jumlah Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2020



Sumber: (DJPK Kementerian Keuangan, 2018)

Gambar 3. Jumlah HPKDYD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2020



1. Pemilihan Model Terbaik

Dari kedua uji yakni *uji chow* dan *uji hausman* dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik ialah model *Fixed Effect (FE)*. Berikut hasil uji model *Fixed Effect (FE)*,

Tabel 2. Hasil Uji Model *Fixed Effect (FE)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	58921.66	15781.53	3.733584	0.0007
X1	0.835305	0.456703	1.828990	0.0767
X2	-0.836314	2.332867	-0.358492	0.7223
X3	0.941436	0.931070	1.011133	0.3195
R-squared	0.823522			
Adjusted R-squared	0.784917			
F-statistic	21.33222			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berikut hasil dari persamaan regresi data panel:

$$PAD Y = 58921.66 + 0.835305*PAJAK_DAERAH_X1_ - 0.836314*RETRIBUSI_DAERAH_X2_ + 0.941436*HPKDYD_X3_$$

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji *eviews*, menunjukkan adanya hubungan antar variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan HPKDYD (X3) sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.898741	0.021462
X2	0.898741	1.000000	0.140008
X3	0.021462	0.140008	1.000000

Berdasarkan tabel 3. hasil uji multikolinearitas, dapat di temukan nilai *correlation* antara X1 dan X2 sebesar $0.898741 < 10$, untuk nilai *correlation*

antara X1 dan X3 sebesar $0.021462 < 10$, serta untuk nilai correlation antara X2 dan X3 sebesar $0.140008 < 10$. Maka dengan demikian disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam data ini.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas Glejser dengan Resabs/Residual Absolut yang menunjukkan nilai probabilitas setiap variabel bebas yaitu pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan HPKDYD (X3):

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10770.24	7473.613	1.441102	0.1593
X1	-0.294726	0.216279	-1.362709	0.1825
X2	2.017277	1.104769	1.825971	0.0772
X3	-0.271166	0.440924	-0.614996	0.5429

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai prob. X1 sebesar 0.1825, X2 sebesar 0.0772, dan X3 sebesar 0.5429 yang ketiganya memiliki nilai prob. > 0.05 . Dengan demikian data dengan model ini terbebas dari heteroskedastisitas.

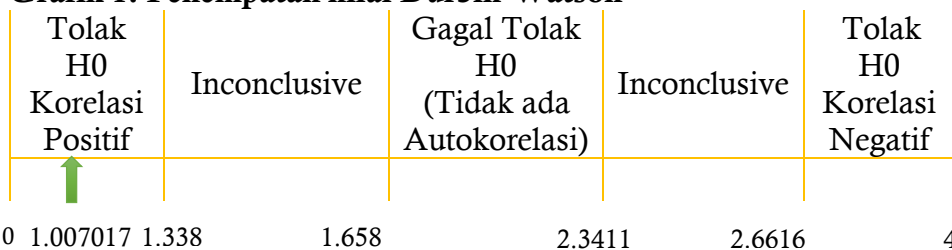
c. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson yang melihat nilai Durbin-Watson stat nya untuk mendeteksi apakah terjadi autokorelasi atau tidak ditunjukn pada table 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	58921.66	15781.53	3.733584	0.0007
X1	0.835305	0.456703	1.828990	0.0767
X2	-0.836314	2.332867	-0.358492	0.7223
X3	0.941436	0.931070	1.011133	0.3195
Durbin-Watson stat				1.0070
Durbin-Watson stat				17

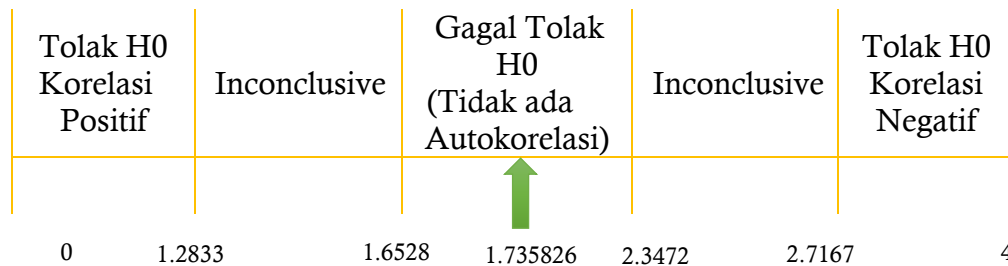
Grafik 1. Penempatan nilai Durbin-Watson



Dari hasil Uji Durbin-Watson diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson stat sebesar 1.007017, dimana nilai tersebut lebih kecil dari d_L , maka diputuskan untuk tolak H0 atau dengan kata lain terdapat Autokorelasi pada

data. Untuk itu dilakukan metode diferensi guna menyembuhkan asumsi autokorelasi. Berikut hasil autokorelasi dengan metode diferensi,

Grafik 2. Penempatan setelah koreksi nilai Durbin-Watson

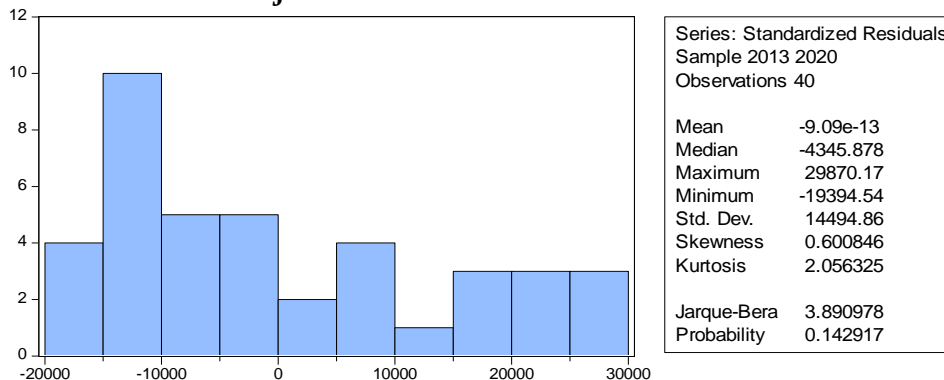


Dari hasil Uji Durbin-Watson dengan penyembuhan autokorelasi metode diferensi diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson stat sebesar 1.735826, dimana nilai tersebut lebih besar dari d_U dan $4-d_U$, maka diputuskan untuk terima H_0 atau dengan kata lain tidak terdapat Autokorelasi pada data.

d. Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas yang menilai sebaran data variabel dilihat dari probabilitas jarque-bera yang membuktikan apakah ada tidaknya ketidakknormalan pada model:

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4., diperoleh nilai Prob. Jarque-Bera sebesar $0.142917 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa model ini berdistribusi normal.

Pegujian Hipotesis

a. Uji-t (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji-t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	58921.66	15781.53	3.733584	0.0007
X1	0.835305	0.456703	1.828990	0.0767
X2	-0.836314	2.332867	-0.358492	0.7223
X3	0.941436	0.931070	1.011133	0.3195

- Variabel Pajak Daerah (X1)

Diketahui nilai t-statistik dari Pajak Daerah adalah sebesar 1.828990 sementara nilai t-tabel 2.02809, jadi nilai t-statistik \leq t-tabel. Dengan demikian H0 diterima, artinya variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Variabel Retribusi Daerah (X2)

Diketahui nilai t-statistik dari Retribusi Daerah adalah sebesar -0.358492 sementara nilai t-tabel sebesar 2.02809, jadi nilai t-statistik \leq t-tabel. Dengan demikian, menerima H0. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/HPKDYD (X3)

Diketahui nilai t-statistik dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) sebesar 1.011133 sementara nilai t-tabel sebesar 2.02809, jadi nilai t-statistik \leq t-tabel. Dengan demikian, menerima H0. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Uji F (Simultan)

Nilai $df_1 = 3$ dan $df_2 = n-k-1 = 36$ atau $df(2.87)$ pada $\alpha=0.05$ diperoleh nilai F-tabel 2.87 dan hasil F-statistik diperoleh nilai sebesar 21.33222, sehingga nilai F-statistik ($21.33222 \geq F\text{-tabel}(2.87)$), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) berpengaruh secara simultan dan bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2020.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) PAD sebesar 0.823522 atau 82%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) menjelaskan variabel terikat PAD Kabupaten dan Kota di

Provinsi Kalimantan Utara sebesar 82% dan sisanya sebesar 18% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) berpengaruh secara serentak terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Perpajakan et al., 2017), dimana nilai signifikannya sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 berarti variabel penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Pajak Daerah dengan PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1.828990 dengan koefisien regresi sebesar 0.835305 dan nilai probabilitas 0.0767 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif, namun tidak signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sari, 2019) yang menganalisis tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2010 – 2017. Yang mana penelitian ini juga memiliki hasil pengujian yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD, artinya ketika pajak daerah mengalami peningkatan, maka PAD belum tentu meningkat pula.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Retribusi Daerah dengan PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan nilai t-statistik sebesar -0.358492 dengan koefisien regresi sebesar -0.836314 dan nilai probabilitas 0.7223 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sari, 2019) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD, artinya ketika retribusi daerah meningkat, maka tidak akan meningkatkan PAD.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) dengan PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1.011133 dengan koefisien regresi sebesar 0.941436 dan nilai probabilitas 0.3195 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian (Suharyadi et al., 2018) yang membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk gambaran mengenai penerimaan pajak daerah dan HPKDYD, wilayah yang memegang posisi dominan lima kabupaten/kota Kaltara ialah kota Tarakan, serta untuk wilayah yang berkontribusi besar pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Kabupaten Bulungan. Ini menandakan persediaan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan di Kaltara masih terbelang kurang memadai. Begitu pula dengan kinerja pasar yang ada belum dapat merata di beberapa daerah lainnya.

Untuk pengujian regresi data panel diperoleh hasil yang menunjukkan bahwasanya Pajak Daerah dan HPKDYD berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap PAD kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2013-2020 yang artinya ketika Pajak Daerah dan HPKDYD meningkat, maka PAD juga mengalami peningkatan, tetapi peningkatan ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh besar atau dengan kata lain pengaruhnya kecil. Sedangkan, untuk hasil dari pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan Retribusi Daerah tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2013-2020 yang berarti bahwa ketika Retribusi Daerah meningkat, maka PAD mengalami penurunan dan pengaruh tersebut kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S., Brata, Y. R., Herlina, E., Prawiranegara, B., & Prabowo, F. H. E. (2019). Assessing Local Tax Contributions To Local Own Revenue: Evidence in One Region in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3881>
- Albab, F. N. U., Ramadhani, R., & Komariyah, E. F. (2020). The Effect of Local Taxes, Local Retributions, and Capital Expenditures on Local Own-Source Revenue (Evidence from Bengkulu Regency). *International*

- Journal of Business, Education, Humanities, and Social Sciences*, 2(2), 84–88.
<https://journal.uty.ac.id/index.php/IJBHES/article/view/93>
- Anggraini, V., Hidayati, K., & Lestari, T. (2017). *Daerah , Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya*. 3, 854–866.
- DJPK Kementerian Keuangan. (2018). *Setelah TA 2006 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. DJPK.Kemenkeu.Go.Id.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Elim, M. E. dan I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>
- Hadiyatno, D., Susiswo, S., Patimah, S., Nainggolan, H., & Ernayani, R. (2020). the Effect of Local Taxes, Regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on the Increase of District Own Source Revenue. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 426–431.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8153>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Ilmu, J. (2017). *TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Rudi Prasetyo Sutjipto Ngumar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya PENDAHULUAN Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik da. 6.*
- Kresnandra, A., & Erawati, N. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544–560.
- mulyana utami, E. surasetyo ningsih. (2018). Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Mulyana Utami1, Endang Surasetyoningsih2*, 3(4), 672–687.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Perpajakan, K., Kepatuhan, T., & Pajak, W. (2017). *Ekonomi – Akuntansi 2017*. 1–16.
- Sari, W. . (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5, 120–125.
<https://repository.unsri.ac.id/18485/>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah

Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–12.

Thamus, D. H. (2020). The Analysis of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province. *Budapest International Research and Critics Institute*, 3(4), 3526–3539.